

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tingkat keberhasilan pembangunan Indonesia di segala bidang sangat tergantung pada sumber manusia sebagai aset bangsa dalam mengoptimalkan perkembangan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam kondisi yang demikian, hanya tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi setiap sendi kehidupan. Menghadapi kondisi tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan telah berupaya meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.

Salah satu lembaga pada jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan pada dunia kerja, antara lain melalui pendidikan menengah kejuruan. Tampaknya perhatian pemerintah saat ini terhadap pendidikan kejuruan menjadi sangat penting mengingat tuntutan kualitas sumber daya manusia di pasaran semakin meningkat.

Pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, dan mengembangkan diri di kemudian hari. (Depdiknas, 2004 :1).

Sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan adalah “mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia produktif yang dapat langsung bekerja pada bidangnya melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi “ ( Depdiknas, 2004 :3 ).

Salah satu pendidikan kejuruan jalur formal yang dikembangkan di Indonesia adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK ). SMK merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang kejuruan. Lulusan SMK diharapkan menjadi individu yang produktif, mampu bekerja sebagai tenaga kerja tingkat menengah saat ini semakin didambakan masyarakat, khususnya masyarakat yang langsung berkecimpung dalam dunia kerja. Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan tersebut memang memiliki kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan vokasional sesuai dengan bidangnya.

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam renstra Program Penguatan Kebijakan Depdiknas dengan RPJM Bappenas, salah satunya adalah pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal di setiap kabupaten/kota. Khusus mengenai SMA dan SMK Depdiknas memiliki kebijakan untuk meningkatkan rasio SMK lebih besar dari pada SMA yaitu 70% SMK dan 30% SMA pada tahun 2015. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran bahwa bangsa Indonesia pada saat ini masih banyak memerlukan tenaga kerja tingkat menengah.

Kenyataan ini didasari oleh pengembangan sumber daya manusia yang belum benar-benar mengarah kepada kondisi yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan (1) struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja yang kurang terdidik, sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi; (2) penyiapan tenaga kerja tingkat menengah seakan-akan

hanya menjadi tugas dan dilakukan oleh SMK, sementara sebagian tamatan SMA atau yang sederajat tidak melanjutkan pendidikannya dan masuk ke pasar kerja; (3) tingkat pengangguran tamatan sekolah menengah masih besar, tingkat pengangguran tamatan SMK lebih besar dari pada tamatan SMA; (4) penguasaan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan tenaga-tenaga kerja di negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Semua ini menyebabkan tenaga kerja Indonesia sulit bersaing bahkan tidak sedikit peluang kerja yang ada di Indonesia diisi oleh pekerja asing. Oleh karena itu maka peningkatan mutu sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam pembangunan.

Kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut di atas. Untuk itulah pemerintah berupaya mengubah paradigma bahwa sekolah kejuruan adalah sekolah “kelas dua” setelah SMA. Pemerintah juga telah menetapkan SMK menjadi primadona sekolah menengah. Kebijakan pemerintah yang menargetkan angka perbandingan SMK terhadap SMA hingga 70% : 30% sampai tahun 2015 mengandung pengertian bahwa ke depan SMA hanya fokus mempersiapkan siswa yang akan mengambil karir di bidang akademik sedangkan SMK untuk siswa yang berorientasi kerja.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan SMA, sekalipun di sisi lain juga memiliki kelemahan. Kelebihannya antara lain bahwa lulusannya dapat mengisi peluang kerja pada dunia usaha/industri karena terkait dengan suatu sertifikasi yang dimiliki oleh lulusannya melalui Uji Kompetensi dan Uji Profesi. Dengan sertifikasi tersebut,

sepanjang lulusan tersebut memenuhi persyaratan, lulusan SMK juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan program studi dan kriteria yang dipersyaratkan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK sehingga dicapai rasio tersebut diatas, maka jumlah SMK akan terus bertambah. Penambahan ini dilakukan dengan cara membuat UPT SMK baru atau mengubah SMA yang tidak berkembang, sehingga berdiri SMK-SMK baru baik negeri maupun swasta dengan berbagai jenis dan bidang serta program studi keahlian. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan daya tampung dan kualitas pendidikan menengah kejuruan.

Gambaran tentang kualitas pendidikan kejuruan yang disarikan oleh Finch dan Crunkilton dalam (Erna Fasiati, 2005 : 7) bahwa 'kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda yaitu ukuran sekolah atau *in-school success students* dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau *out-school students*'. Kriteria pertama, meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja. Sedangkan kriteria kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang ditampilkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai **standar kompetensi kerja nasional maupun internasional** setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya. Kualitas kerja yang dimaksud adalah memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan, serta senantiasa berusaha

mengembangkan kompetensi tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi untuk lebih meningkatkan produktivitasnya.

Depnakertrans RI ( 2004 : 1 ) memberikan pengertian tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia( SKKNI ) yaitu :

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan pekerjaan tertentu yang berlaku secara nasional.

SKKNI yang telah disusun dan telah mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasakan manfaatnya apabila telah terimplementasi secara konsisten. SKKNI digunakan sebagai acuan untuk : (1) menyusun uraian pekerjaan; (2) Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia; (3) Menilai unjuk kerja seseorang; dan (4) Akreditasi profesi di tempat kerja. Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka seseorang akan mampu : (1) Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan; (2) Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan; (3) Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula; dan (4) Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda. Untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan sesuai tuntutan dunia kerja tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya, mengingat masih terjadi kelemahan-kelemahan pada pendidikan kejuruan model lama, sebagaimana dijelaskan Indra Djati Sidi (2001:111) bahwa kelemahan pendidikan kejuruan model lama umumnya berkisar pada konsep dan pelaksanaannya. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut yaitu :

Pertama, dari segi konsep, pendidikan kejuruan model konvensional memiliki kelemahan-kelemahan berikut ini : (1) Penerapan pendekatan “ *supply driven* “ dimana totalitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilakukan secara sepihak oleh Depdiknas; (2) Penerapan “ *school based model* “ telah membuat peserta didik tertinggal oleh kemajuan dunia usaha/industri; (3) Pengajaran berbasis mata pelajaran telah membuat tidak jelas pencapaian kompetensi; (4) Pendidikan kejuruan berbasis sekolah kurang luas (kaku); (5) Tidak mengakui keahlian yang diperoleh dari luar sekolah; (6) Pendidikan kejuruan hanya menyiapkan tamatan untuk bekerja di sektor formal; (7) Pendidikan kejuruan merupakan “ *dead-end career*“ (terminal ); (8) Kurang adanya integrasi antara pendidikan dan pelatihan kejuruan; (9) Guru kejuruan tidak memiliki pengalaman kerja industri; (10) Pengelolaan pendidikan kejuruan terlalu sentralistis; dan (11) Pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah (SMK Negeri) dan sepenuhnya oleh siswa ( SMK Swasta ).

Kedua, dilihat dari segi praktik, pendidikan kejuruan model lama juga memiliki banyak kelemahan, yaitu kurang mempersiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja, tidak efisien, kurang mampu menjaga relevansi dengan perubahan pasar kerja, kurang mutakhir, sukar berubah atau konservatif. Tamatan SMK sering dikritik kurang mampu mengikuti perubahan, karena mereka kurang dibekali hal-hal berikut ini : (1) Keterampilan dasar (baca, tulis, dengar, bicara, hitung, dan matematika); (2) Keterampilan berpikir (berpikir kreatif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, belajar cara belajar, dan mampu mengemukakan



alasan); (3) Kualitas kalbu (tanggung jawab, kejujuran, integritas, kerja sama, kerja keras, disiplin dan jiwa kewirausahaan).

Ketiga, dilihat dari segi sistem, pendidikan yang berlaku pada sekolah kejuruan model lama kurang sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri. Perbedaan yang mendasar antara budaya sekolah dan budaya industri ini tidak harus terjadi sekiranya dunia usaha/industri diikutsertakan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.

Keempat, dilihat dari tradisi, banyak kebiasaan salah yang dilakukan terus menerus oleh guru tanpa ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya salah. Diantara beberapa kebiasaan salah yang memerlukan koreksi tersebut yaitu : (1) pelajaran praktik dasar tidak diajarkan sesuai dengan prinsip dasar yang benar; (2) membiarkan siswa menghasilkan mutu hasil kerja asal jadi; (3) membiarkan siswa bekerja tanpa bimbingan dan pengawasan; dan (4) membiarkan siswa bekerja tanpa memperhatikan keselamatan kerja.

Menyadari akan kelemahan-kelemahan tersebut, maka upaya-upaya dalam melakukan perubahan secara mendasar (reformasi) terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan konvensional di Indonesia perlu dilakukan agar dapat mengejar ketertinggalan dalam penyiapan tamatan sekolah menengah kejuruan yang berkualitas.

Sejalan dengan itu, Mamiék Slamet (1997:17) mengemukakan bahwa perubahan-perubahan mendasar dalam pendidikan menengah kejuruan tersebut adalah :

Perubahan yang dilakukan melalui proses bekerja di dunia kerja akan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai di dunia kerja yang

tidak mungkin atau sulit didapat di sekolah antara lain pembentukan wawasan mutu, wawasan keunggulan, wawasan nilai tambah, dan pembentukan etos kerja.

Sementara, Wardiman Djoyonegoro (2001 :6) mengungkapkan bahwa :

Hakikat pembaharuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebijakan *link and match*, adalah adanya perubahan pola pendidikan lama yang cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkret menjadi pendidikan kejuruan sebagai program pengembangan sumber daya manusia.

*Link and Match* adalah kebijakan pemerintah yang dicetuskan oleh Wardiman Djoyonegoro (Mendikbud pada waktu itu) untuk perubahan pendidikan kejuruan. Secara harfiah "*link*" berarti terkait, dan "*match*" berarti cocok, menyangkut hasil harus sesuai atau sepadan. Sehingga *link and match* sering diterjemahkan menjadi terkait dan cocok/sepadan. Mengacu pada konsep ini, diharapkan terdapat keterkaitan dan kecocokan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, yang mana orientasi pendidikan kejuruan dan pelatihan sumber daya manusia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Untuk itu diperlukan penerapan konsep *link and match* dalam berbagai kebijakan dan program-program pendidikan. Beberapa prinsip utama dari konsep tersebut yaitu : (1) sistem pendidikan harus terkait dan sepadan dengan kebutuhan yang terus berkembang dari berbagai sektor industri akan tenaga kerja yang menguasai keterampilan dan keahlian profesional dalam berbagai cabang Iptek; (2) sistem pendidikan harus terkait dan sepadan dengan nilai, sikap, perilaku, dan etos kerja masyarakat yang sudah mulai mengarah pada era industri dan teknologi, dan (3) sistem pendidikan harus terkait dan sepadan dengan masa depan yang akan ditandai dengan perubahan dan perkembangan yang terus berlangsung (Suryadi, 1977:19).



Dalam rangka mengantisipasi hal seperti tersebut tersebut, diamanatkan dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam lembaran negara bagian c menyebutkan bahwa :

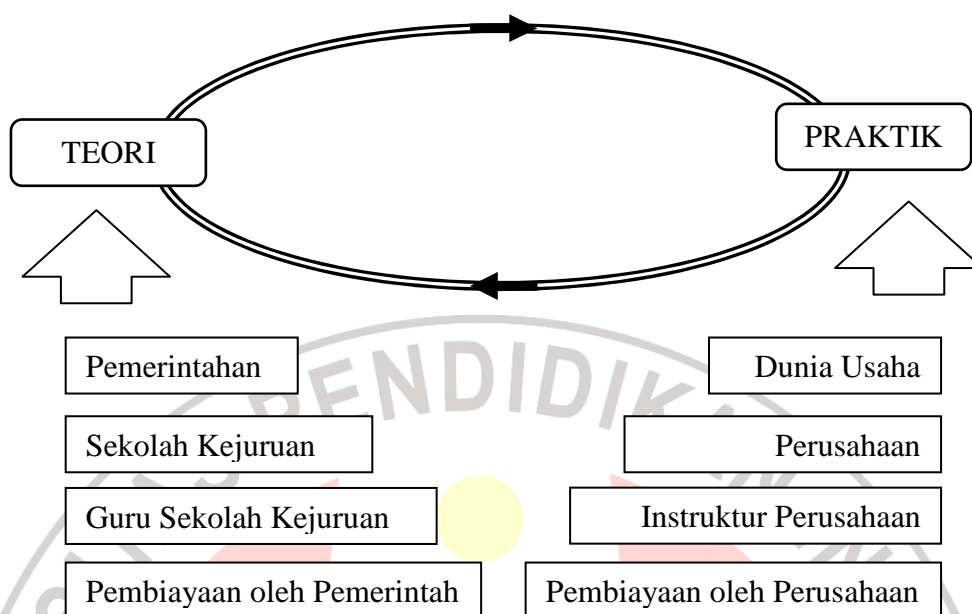
Sistem pendidikan nasional mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan-perubahan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pembaharuan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai / relevan dan yang mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha/dunia industri. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan sudah seharusnya dirancang dan dilaksanakan berdasarkan apa yang dapat dilakukan di tempat kerja yang diarahkan kepada unjuk kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Pendidikan Sistem Ganda atau *Dual System* merupakan salah satu konkretisasi dari reformasi pendidikan kejuruan sebagaimana diuraikan tersebut.

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui praktik langsung di dunia kerja (Indra Djati Sidi, 2001 : 127).

Dengan demikian, para siswa SMK dengan program Pendidikan Sistem Ganda ini akan memiliki tingkat profesional yang sambung dengan dunia kerja yang dibutuhkan. Sebagaimana gambar di bawah ini yang menunjukkan putaran program pembelajaran siswa yang terjadi di sekolah dan di dunia kerja.



**Gambar 1.1.**

**Interaksi antara Sekolah dan Industri melalui Para Siswa**

Sumber : Indra Djati Sidi ( 2001 : 128 ).

Dalam pengertian tersebut, terdapat dua pihak yaitu lembaga pendidikan (sekolah) dan dunia kerja (industri/ perusahaan) secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program pendidikan dan pelatihan. Pergeseran pendidikan kejuruan dari model konvensional menuju model Pendidikan Sistem Ganda merupakan perubahan yang sangat mendasar (reformasi), oleh karena itu memerlukan perubahan-perubahan dalam sistem, budaya, dan pelakunya. Menyadari akan hal ini, Depdikbud (pada waktu itu) melakukan perbaikan-perbaikan terutama terhadap konsep, program, serta operasionalisasinya melalui pengarahannya, pembimbingan, serta dukungan terhadap proses maupun hasil kinerja Pendidikan Sistem Ganda. Dengan pendekatan sistem ganda, diharapkan kualifikasi tamatan

pendidikan kejuruan dapat sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Secara umum, Pendidikan Sistem Ganda bertujuan untuk menjawab tantangan industri. Sedangkan secara rinci, Pendidikan Sistem Ganda bertujuan :

- (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat kemampuan kompetensi, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja;
- (2) meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan antara lembaga pendidikan kejuruan dan dunia usaha;
- (3) meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional;
- dan (4) memberi pengakuan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan (Indra Djati Sidi, 2001:128).

Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan, dalam Pendidikan Sistem Ganda dituntut adanya perubahan terhadap pengelolaan kegiatan belajar dimana terdapat dua tempat penyelenggaraan pendidikan yaitu sekolah dan institusi pasangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Panduan PSG tentang Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar, yaitu :

Pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam Pendidikan Sistem Ganda merupakan serangkaian proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah dan di institusi pasangan sebagai suatu kesatuan yang utuh (Depdikbud, 1997:1).

Melalui proses tersebut, diharapkan dapat dicapai kompetensi lulusan SMK yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Di samping itu perubahan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dari sistem persekolahan ( *School Broe System* ) kepada sistem ganda yang melibatkan dunia usaha/industri menuntut

adanya perubahan terhadap pengelolaan peralatan dan bahan praktik sebagai salah satu konsekuensinya. Dengan kata lain, ketersediaan peralatan dan bahan praktik menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pendidikan kejuruan. “Peralatan dan bahan praktik yang dimaksud adalah peralatan dan bahan praktik yang digunakan untuk pelaksanaan praktik dasar dan praktik industri/ keahlian yang disusun bersama antara sekolah dan dunia industri “. (Depdikbud, 1997 : 1). Oleh karena itu, perlu pemikiran tentang suatu sistem pengelolaan peralatan dan bahan praktik yang efektif dan efisien.

Memperhatikan uraian tersebut diatas, Pendidikan Sistem Ganda merupakan bentuk kerja sama yang *win-win* antara sekolah dan industri untuk memenuhi tugas dan fungsi masing-masing. Sekolah melakukan semacam *outsourcing* yang dilaksanakan di industri dalam bentuk pemanfaatan sarana praktik, instruktur dan pengalaman. Sedangkan industri dapat memandang sekolah sebagai bagian dari HRD (*Human Resource Department*) mereka untuk menyiapkan tenaga ahli yang profesional. Dengan demikian sumber-sumber (*resources*) yang digunakan bagi kedua belah pihak menjadi sangat efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan sekaligus meningkatkan mutu produk dengan harga yang bersaing.

Lembaga pendidikan dalam hal ini SMK bermutu sangat berhubungan dengan harapan keberhasilan siswa setelah lulus, yaitu memiliki moral yang baik, keterampilan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta kemampuan intelektual sehingga pengguna lulusan puas terhadap mutu lulusan sebagai hasil kinerja sekolah. Menurut Edward Sallis (2008:6) salah satu ciri sekolah bermutu

adalah sekolah yang terfokus pada kepuasan pelanggan ( *customer satisfaction* ) baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Hal ini berarti sekolah harus menyadari bahwa siswa, orang tua, dan *stakeholder* merupakan pelanggan yang harus diperhatikan keberadaannya sehingga keberhasilan sistem pendidikan di sekolah tetap terjaga. Sebagai industri jasa penyelenggara pendidikan, sekolah dapat dianalogikan dengan proses produksi. Sekolah dapat dipandang sebagai lembaga yang memproduksi atau menjual jasa kepada pelanggannya. Dengan berpegang pada konsep ini, maka mutu suatu pendidikan ditentukan oleh sejauh mana pelanggan baik internal maupun eksternal merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh sekolah. Dengan kata lain, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang penyelenggaraannya sesuai dengan harapan dan kepuasan para pelanggannya, dalam hal ini adalah sekolah yang dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi kerja sesuai harapan dan tuntutan dunia usaha / industri.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan baik melalui pengamatan maupun wawancara secara tidak formal dengan sejumlah siswa, walaupun Pendidikan Sistem Ganda telah diterapkan sebagai sistem dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua SMK Negeri dan swasta di Kota Cirebon, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kesenjangan, antara lain : (1) Pihak sekolah masih kesulitan mencari dunia usaha/industri yang relevan. Dunia usaha/dunia industri sebagai institusi pasangan dalam penyelenggaraan pendidikan sistem ganda sangat heterogen baik dalam tingkat pemahaman maupun tingkat partisipasi dan keterlibatannya dalam kerja sama dengan sekolah untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan kejuruan; (2) Pada

umumnya sampai saat ini pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masih bersifat *supply driven* yaitu pengembangan program pendidikan yang lebih mementingkan jumlah siswa yang tamat, bukan banyaknya tamatan yang bekerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada dunia kerja (*demand driven*). Diindikasikan hanya sebagian kecil (kurang dari 30 %) tamatan yang bekerja sesuai dengan bidang yang dipelajarinya; (3) Respon dunia usaha/ industri belum begitu tinggi terhadap sekolah. Pengelolaan kegiatan belajar yang sejalan dengan konsep pendidikan sistem ganda belum sesuai dengan harapan. Kesenjangan ini di satu pihak disebabkan partisipasi institusi pasangan dalam penyelenggaraan pendidikan masih rendah. Keterlibatannya sebagian besar hanya pada kegiatan pengujian yang dilaksanakan pada akhir masa pendidikan. Sementara penyusunan program dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih banyak sekolah yang memiliki peran. Disamping itu, sumber daya sekolah antara lain guru dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam, serta kualitas dan kuantitas sarana praktik yang belum terstandar .

Fenomena tersebut merupakan bagian dari lemahnya manajemen/ pengelolaan pembelajaran yang mengakibatkan penyelenggaraan sekolah kurang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut , masalah ini menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui penelitian yang difokuskan pada judul penelitian “**Kontribusi Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar dalam Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan Ketersediaan Sarana Praktik terhadap Efektivitas Pembelajaran**” (Studi Tentang Persepsi Siswa pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon)



## B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah, bahwa terdapat beberapa kesenjangan dalam penyelenggaraan PSG di SMK khususnya di Kota Cirebon baik negeri maupun swasta. Dari beberapa permasalahan yang ada, masalah pengelolaan pembelajaran dan sarana merupakan masalah yang urgensinya sangat menonjol. Sementara, keduanya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda dalam meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional, yang secara otomatis berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG dan ketersediaan sarana praktik terhadap efektivitas pembelajaran. Sehubungan dengan berbagai keterbatasan, saat ini penelitian baru dilakukan ditinjau dari aspek **persepsi siswa**.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut, masalah dalam penelitian ini dirumuskan berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah gambaran secara aktual pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
2. Bagaimanakah gambaran secara aktual tentang ketersediaan sarana praktik pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
3. Bagaimanakah gambaran secara aktual tentang efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.

4. Seberapa besar kontribusi pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
5. Seberapa besar kontribusi ketersediaan sarana praktik terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
6. Seberapa besar kontribusi pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG dan ketersediaan sarana praktik secara bersama-sama terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep, teori, dan pendekatan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG, ketersediaan sarana praktik, dan efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data, mengolah, menganalisis dan menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis data dan teori yang dikemukakan para ahli pada bidang tersebut.

Secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Gambaran secara aktual tentang pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
2. Gambaran secara aktual tentang ketersediaan sarana praktik pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
3. Gambaran secara aktual tentang efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.

4. Kontribusi pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
5. Kontribusi ketersediaan sarana praktik terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
6. Kontribusi pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG dan ketersediaan sarana praktik terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian ke arah pengembangan konsep-konsep tentang peningkatan efektivitas pembelajaran. Pembahasan topik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari peningkatan efektivitas sekolah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Pada tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepala sekolah, guru maupun lembaga pendidikan. Dari penelitian ini diharapkan dapat ditemukan kondisi nyata, bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga sekolah dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi harapan dunia usaha/industri melalui pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan ketersediaan sarana praktik. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dalam melakukan penelitian sejenis

untuk mencari permasalahan lain yang ada diluar pembahasan masalah penelitian ini.

### **E. Anggapan Dasar**

Pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG dan ketersediaan sarana praktik dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon, penulis perlu mengemukakan anggapan dasar dalam penelitian ini. Anggapan dasar dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah sehingga hasil penelitian dapat diterima secara ilmiah. Dengan kata lain, penelitian yang baik memerlukan pedoman sebagai dasar penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dapat dikatakan bahwa asumsi merupakan titik tolak dilakukannya penelitian ditinjau dari segi permasalahan. Hal ini ditegaskan oleh Winarno Surakhmad dalam Suharsimi Arikunto (2006:65) yang menyatakan bahwa asumsi atau anggapan dasar atau postulat adalah “sebuah titik tolak pemikiran, kebenarannya diterima oleh penyelidik”. Anggapan dasar yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam pelaksanaan PSG terdapat dua tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbeda, yaitu sekolah dan institusi pasangan. Implikasi dari kedua penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut terdapat dua pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berbeda, akan tetapi tetap utuh sebagai suatu rangkaian upaya pencapaian kompetensi siswa. Pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG merupakan serangkaian proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar

mengajar yang dilaksanakan di sekolah dan di Institusi Pasangan sebagai satu kesatuan utuh. (Depdikbud, 1997 :1).

2. Sarana atau peralatan praktik pada SMK merupakan salah satu sarana pendidikan yaitu peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan praktik dasar dan praktik keahlian yang disusun bersama antara sekolah dan dunia usaha/ industri (Depdikbud, 1997:1). Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda, maka setiap SMK minimal memiliki beberapa jenis peralatan, bahan, perabot, dan peralatan penunjang praktik baik untuk praktik dasar maupun praktik keahlian. Untuk itu, ketersediaan sarana praktik sangat mempengaruhi pencapaian kompetensi siswa.
3. Efektivitas berarti terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti juga efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dari perbuatan itu telah dicapai secara maksimal baik mutu atau jumlahnya (The Liang Gie, 1981:109).  
“Efektivitas merupakan suatu dimensi tujuan manajemen yang berfokus pada hasil, sasaran, dan target yang diharapkan” (Komariah, 2006:28). Efektivitas pembelajaran dapat dicapai apabila semua unsur dan komponen yang terdapat pada sistem pembelajaran berfungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Efektivitas pembelajaran dapat dicapai apabila rancangan pada perencanaan, implementasi dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa efektivitas pembelajaran pada SMK adalah tercapainya kompetensi lulusan yaitu kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha

/industri, ketercapaiannya dapat dipengaruhi oleh pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan ketersediaan sarana praktik.

#### **F. Hipotesis Penelitian**

Berkenaan dengan masalah yang diteliti, maka dirumuskan hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
2. Ketersediaan sarana praktik berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
3. Pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG dan ketersediaan sarana praktik secara simultan berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pembelajaran pada SMK Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Singarimbun, M. (2003:46-47) memberikan pengertian tentang definisi operasional, yaitu “definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional merupakan petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel”. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

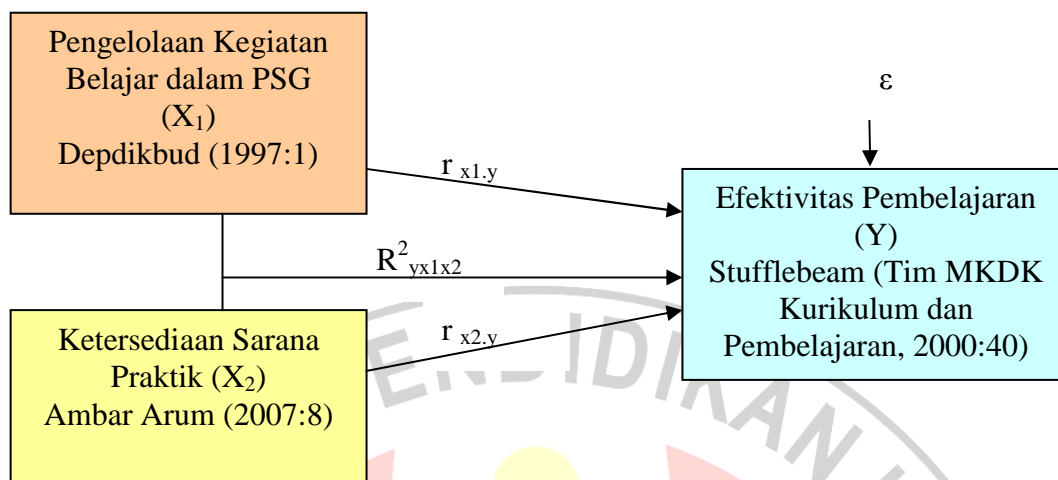
1. Pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG adalah serangkaian proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan mengajar yang dilaksanakan di sekolah dan di institusi pasangan sebagai suatu



kesatuan yang utuh. Indikator pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam PSG menurut Depdikbud (1997:1) meliputi : (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) penilaian, dan (d) sertifikasi.

2. Ketersediaan Sarana Praktik adalah suatu kondisi yang menunjukkan tentang kemampuan menyediakan peralatan pokok dan peralatan penunjang yang langsung digunakan dalam kegiatan pembelajaran terutama kegiatan praktik baik praktik dasar maupun praktik keahlian agar tujuan pembelajaran tercapai. Indikator ketersediaan sarana praktik menurut Ambar Arum (2007:8) meliputi: (a) perencanaan, (b) pengadaan, (c) penyimpanan, (d) penggunaan, (e) pemeliharaan, (f) penghapusan.
3. Efektivitas Pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam proses pembelajaran setiap elemen berfungsi secara keseluruhan. Efektivitas pembelajaran menunjukkan ketercapaian sasaran atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas pembelajaran menurut Stufflebeam (Tim MKDK Kurikulum dan Pembelajaran, 2000:40) meliputi: (a) Konteks (*context*); (b) Masukan (*input*); (c) Proses (*process*); dan (d) Hasil (*product*).

Lebih jelasnya, model dari hubungan yang terdapat antara variabel pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan PSG ( $X_1$ ), ketersediaan sarana praktik ( $X_2$ ), dan efektivitas pembelajaran ( $Y$ ) digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.2.**  
**Paradigma Penelitian**

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah dalam mengumpulkan atau mengorganisasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif dan teknik survey. Sedangkan sebagai alat pengumpul data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan angket (kuesioner).

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

### 2. Populasi dan Sampel Penelitian

Berkenaan dengan penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah siswa-siswa SMK Negeri dan Swasta dari Program Studi Keahlian Teknik Mekanik Otomotif yang sedang atau telah mengikuti Praktik Kerja Industri (kelas XI atau kelas XII) berjumlah 574 orang.

Sampel diambil secara acak (teknik *random sampling*) dengan anggapan bahwa populasi siswa SMK Negeri dan Swasta Program Studi Keahlian Teknik Mekanik Otomotif yang sedang atau telah mengikuti Praktik Kerja Industri adalah homogen. Untuk menghitung ukuran sampel penulis menggunakan rumus menurut Taro Yamane dalam Riduwan (2010:65) yang didasarkan pada estimasi statistik 10 %, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 85 orang.

